

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo yang meliputi 21 kecamatan yaitu kecamatan Ponorogo, Siman, Mlarak, Jetis, Balong, Kauman, Sukorejo, Babadan, Jenangan, Ngebel, Pulung, Pudak, Sooko, Sawoo, Sambit, Bungkal, Ngrayun, Slahung, Jambon, Badegan, dan Sampung. Jumlah responden sebanyak 400 orang yang di bagi menjadi dua elemen profil responden dengan jumlah 50% responden laki – laki dan 50 % responden perempuan yang responden berasal dari 21 kecamatan di kabupaten Ponorogo tersebut diharapkan dapat mewakili persepsi masyarakat kabupaten Ponorogo mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo periode tahun 2010-2015.

Adapun jumlah responden dari masing-masing kecamatan di kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut,

Tabel 3.1 Jumlah responden di kabupaten Ponorogo

No	Kecamatan	Jumlah responden
1	Ponorogo	34
2	Siman	19
3	Mlarak	17
4	Jetis	14
5	Balong	19
6	Kauman	19
7	Sukorejo	23
8	Babadan	29
9	Jenangan	24
10	Ngebel	9
11	Pulung	22

Tabel 3.1 (Lanjutan) Jumlah responden di kabupaten Ponorogo

No	Kecamatan	Jumlah responden
12	Pudak	4
13	Sooko	10
14	Sawoo	26
15	Sambit	17
16	Bungkal	16
17	Ngrayun	26
18	Slahung	23
19	Jambon	18
20	Badegan	14
21	Sampung	17
Jumlah		400

1. Penilaian Kinerja Per Kecamatan

Jumlah responden masing-masing dari 21 kecamatan berbeda, akan tetapi cukup memberikan gambaran dalam penilaian terhadap kinerja Bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo periode tahun 2010-2015.

a. Kecamatan Ponorogo

Kecamatan Ponorogo merupakan kecamatan yang paling dekat dengan pusat pemerintahan, sehingga wajar jika jumlah responden dari wilayah ini merupakan yang paling banyak yaitu 34 orang. Dari 34 responden, digambarkan penilaian mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi.

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 34 responden di kecamatan Ponorogo menunjukkan persebaran jawaban yang dilihat dari mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi, penegakan hukum dalam penyelesaian kasus korupsi, peraturan yang diterapkan, kerjasama pemerintah kabupaten Ponorogo dengan

lembaga nasional lainnya dalam pemberantasan korupsi, penanaman pendidikan serta budaya anti korupsi di kabupaten Ponorogo, mekanisme pelaksanaan pemberantasan korupsi di kabupaten Ponorogo, pelaksanaan kinerja pemerintah, pelaksanaan tugas yang dilakukan pegawai pemerintah, komunikasi pemerintah terhadap masyarakat sekitar, dan peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Ponorogo maka digunakan skor total ideal maksimum yaitu $10 \times 5 = 50$ dan nilai total minimum ideal yaitu $10 \times 1 = 10$, sehingga diperoleh interval sebagai berikut:

Interval = (skor tertinggi – skor terendah) / jumlah kategori

(Mulyono, 1991: 9)

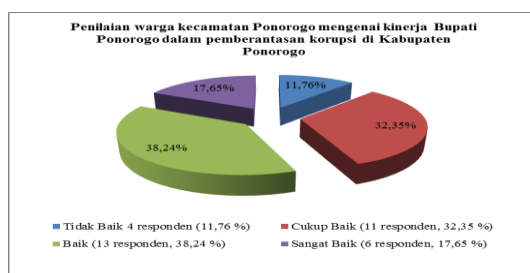
$$= (50 - 10) / 5 = 8$$

Tabel 3.2

Penilaian warga kecamatan Ponorogo mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	4	11,76
> 27 – 34	Cukup Baik	11	32,35
> 35 – 42	Baik	13	38,24
> 43 – 50	Sangat Baik	6	17,65
Jumlah		34	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden paling banyak memberikan jawaban baik yaitu sebanyak 13 orang (38,24 %), responden yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 11 orang (32,35 %) dan sangat baik sebanyak 6 orang (17,65 %), sedangkan penilaian tidak baik sebanyak 4 orang (11,76 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden di kecamatan Ponorogo menilai bahwa kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo sudah baik. Akan pada kecamatan ini ada yang menilai 6 responden dengan sangat baik dan 4 responden dengan nilai tidak baik. Nilai sangat baik itu di pengaruhi oleh masyarakat yang tahu akan kinerja bupati dan nilai tidak baik di pengaruhi oleh masyarakat yang kontra dengan bupati. karena ada beberaaUntuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.1 Penilaian warga kecamatan Ponorogo mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

b. Kecamatan Siman

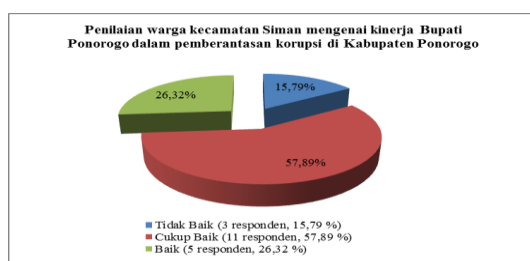
Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 19 responden di kecamatan Siman menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian

kinerja masyarakat di kecamatan Siman dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.3
Penilaian warga kecamatan Siman mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	3	15,79
> 27 – 34	Cukup Baik	11	57,89
> 35 – 42	Baik	5	26,32
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
Jumlah		19	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden paling banyak memberikan jawaban cukup baik yaitu sebanyak 11 orang (57,89 %) atau hampir separuh lebih dari seluruh responden di kecamatan ini, responden yang memberikan jawaban baik hanya 5 orang (26,32 %), sedangkan penilaian tidak baik sebanyak 3 orang (15,79 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden di kecamatan Siman menilai bahwa kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo cukup baik. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.2 Penilaian warga kecamatan Siman mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

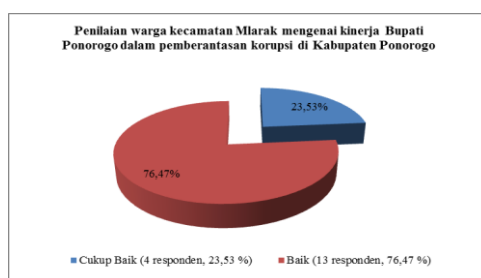
c. Kecamatan Mlarak

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 17 responden di kecamatan Mlarak menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Mlarak dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.4
Penilaian warga kecamatan Mlarak mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	0	0
> 27 – 34	Cukup Baik	4	23,53
> 35 – 42	Baik	13	76,47
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
Jumlah		17	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden paling banyak memberikan jawaban baik yaitu sebanyak 13 orang (76,47 %) atau hampir separuh lebih dari seluruh responden di kecamatan ini, dan sisanya yaitu 4 responden (23,53 %) yang memberikan jawaban cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden di kecamatan Mlarak memberikan penilaian positif mengenai kinerja pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.3 Penilaian warga kecamatan Mlarak mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

d. Kecamatan Jetis

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 14 responden di kecamatan Jetis menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Jetis dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.5

Penilaian warga kecamatan Jetis mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	0	0
> 27 – 34	Cukup Baik	7	50,0
> 35 – 42	Baik	7	50,0
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
Jumlah		14	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden dengan penilaian baik dan cukup baik masing-masing 7 orang (50 %). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden di kecamatan Jetis memberikan penilaian positif mengenai kinerja pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.4 Penilaian warga kecamatan Jetis mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

e. Kecamatan Balong

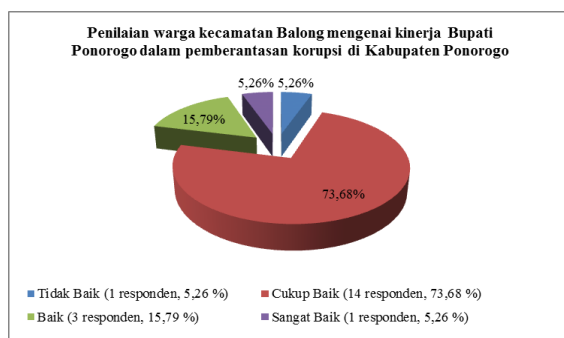
Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 19 responden di kecamatan Balong menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Balong dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.6
Penilaian warga kecamatan Balong mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	1	5,26
> 27 – 34	Cukup Baik	14	73,68
> 35 – 42	Baik	3	15,79
> 43 – 50	Sangat Baik	1	5,26
Jumlah		19	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai cukup baik yaitu 14 orang (73,68 %) atau separuh lebih dari keseluruhan responden, sebanyak 3 orang (15,79 %) menilai baik, dan sebanyak 1 orang (5,26 %) menilai sangat baik, sedangkan 1 orang

(5,26 %) memberikan penilaian tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Jetis menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.5 Penilaian warga kecamatan Balong mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

f. Kecamatan Kauman

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 19 responden di kecamatan Kauman menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Kauman dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.7

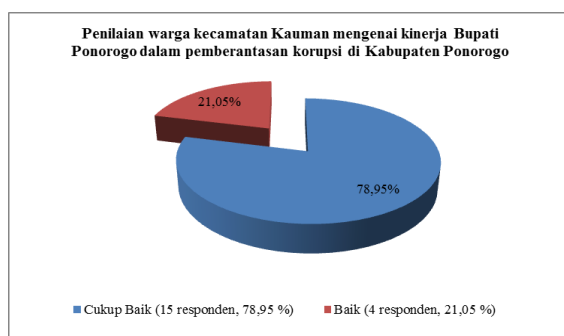
Penilaian warga kecamatan Kauman mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	0	0
> 27 – 34	Cukup Baik	15	78,95
> 35 – 42	Baik	4	21,05

Tabel 3.7
Penilaian warga kecamatan Kauman mengenai kinerja Bupati Ponorogo
dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
	Jumlah	19	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai cukup baik yaitu 15 orang (78,95 %) atau separuh lebih dari keseluruhan responden, dan sisanya yaitu sebanyak 4 orang (21,05 %) menilai baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Kauman menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.6 Penilaian warga kecamatan Kauman mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

g. Kecamatan Sukorejo

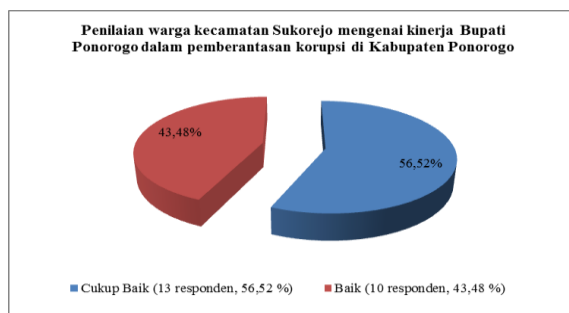
Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 23 responden di kecamatan Sukorejo menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian

kinerja masyarakat di kecamatan Sukorejo dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.8
Penilaian warga kecamatan Sukorejo mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	0	0
> 27 – 34	Cukup Baik	13	56,52
> 35 – 42	Baik	10	43,48
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
Jumlah		23	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai cukup baik yaitu 13 orang (56,52 %) atau separuh lebih dari keseluruhan responden, dan sisanya yaitu sebanyak 10 orang (43,48 %) menilai baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Sukorejo menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.7 Penilaian warga kecamatan Sukorejo mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

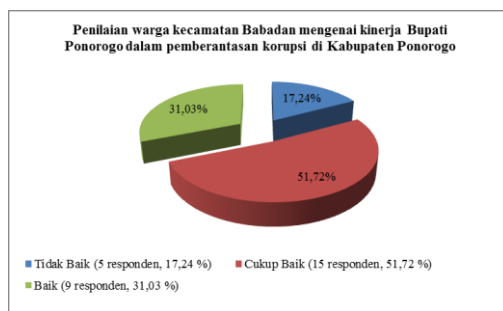
h. Kecamatan Babadan

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 29 responden di kecamatan Babadan menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Babadan dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.9
Penilaian warga kecamatan Babadan mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	5	17,24
> 27 – 34	Cukup Baik	15	51,72
> 35 – 42	Baik	9	31,03
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
Jumlah		29	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai cukup baik yaitu 15 orang (51,72 %) atau separuh lebih dari keseluruhan responden, dan sebanyak 9 orang (31,03 %) menilai baik, sedangkan 5 orang (17,24 %) menilai tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden di kecamatan Sukorejo menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.8 Penilaian warga kecamatan Babadan mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

i. Kecamatan Jenangan

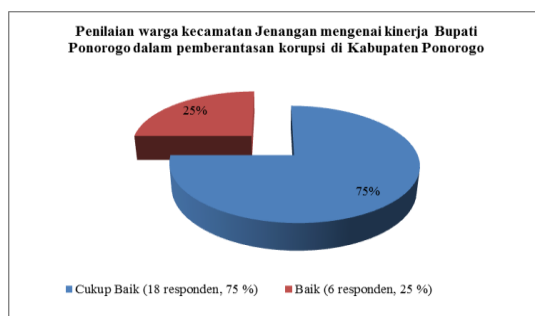
Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 24 responden di kecamatan Jenangan menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Jenangan dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.10
Penilaian warga kecamatan Jenangan mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	0	0
> 27 – 34	Cukup Baik	18	75,0
> 35 – 42	Baik	6	25,0
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
Jumlah		24	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai cukup baik yaitu 18 orang (75 %) atau separuh lebih dari keseluruhan responden, dan sisanya yaitu sebanyak 6 orang (25 %) menilai baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir

seluruh responden di kecamatan Jenangan menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.9 Penilaian warga kecamatan Jenangan mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

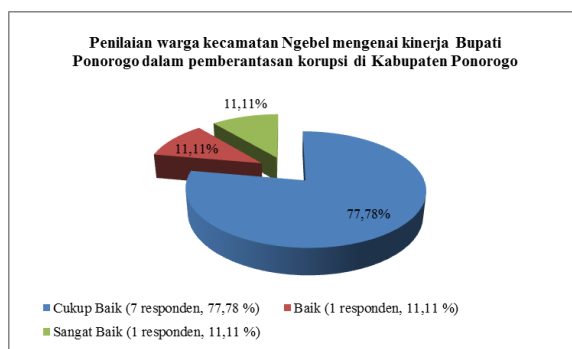
j. Kecamatan Ngebel

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 9 responden di kecamatan Ngebel menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Ngebel dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.11
Penilaian warga kecamatan Ngebel mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	0	0
> 27 – 34	Cukup Baik	7	77,78
> 35 – 42	Baik	1	11,11
> 43 – 50	Sangat Baik	1	11,11
Jumlah		9	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai cukup baik yaitu 7 orang (77,78 %) atau separuh lebih dari keseluruhan responden, dan sisanya yaitu menilai baik dan sangat baik masing-masing 1 orang (11,11 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Ngebel menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.10 Penilaian warga kecamatan Ngebel mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

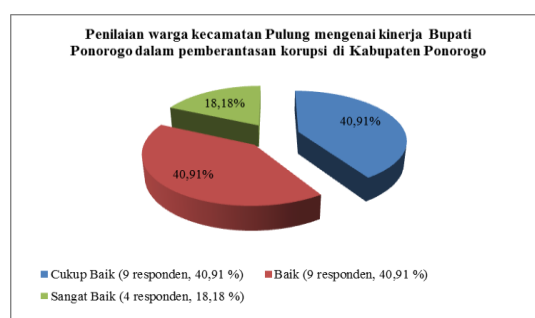
k. Kecamatan Pulung

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 22 responden di kecamatan Pulung menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Pulung dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.12
Penilaian warga kecamatan Pulung mengenai kinerja Bupati Ponorogo
dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	0	0
> 27 – 34	Cukup Baik	9	40,91
> 35 – 42	Baik	9	40,91
> 43 – 50	Sangat Baik	4	18,18
Jumlah		22	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menilai cukup baik dan baik masing-masing 9 orang (40,91 %), dan sisanya yaitu menilai sangat baik sebanyak 4 orang (18,18 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Pulung menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.11 Penilaian warga kecamatan Pulung mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

1. Kecamatan Pudak

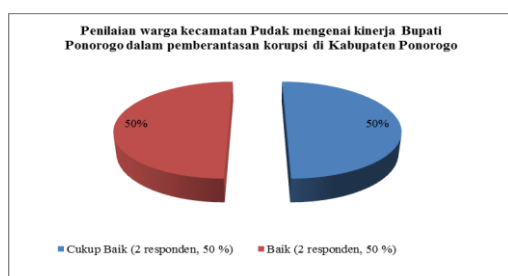
Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 4 responden di kecamatan Pudak menunjukkan hasil sebagai berikut.

Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Pudak dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.13
Penilaian warga kecamatan Pudak mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	0	0
> 27 – 34	Cukup Baik	2	50,0
> 35 – 42	Baik	2	50,0
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
Jumlah		4	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menilai cukup baik dan baik masing-masing 2 orang (50 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Pudak menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.12 Penilaian warga kecamatan Pudak mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

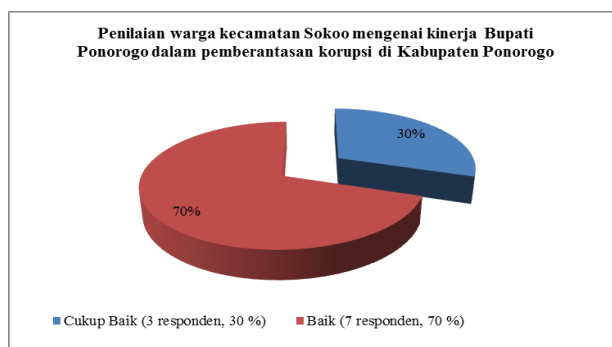
m. Kecamatan Sooko

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 10 responden di kecamatan Sooko menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Sooko dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.14
Penilaian warga kecamatan Sokoo mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	0	0
> 27 – 34	Cukup Baik	3	30,0
> 35 – 42	Baik	7	70,0
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
Jumlah		10	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menilai cukup baik sebanyak 3 orang (30 %) dan baik sebanyak 7 orang (70 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Sokoo menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.13 Penilaian warga kecamatan Sokoo mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

n. Kecamatan Sawoo

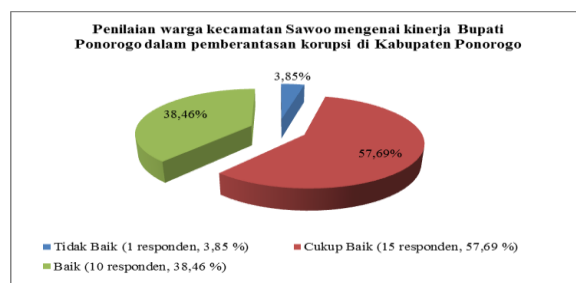
Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 26 responden di kecamatan Sawoo menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Sawoo dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.15
Penilaian warga kecamatan Sawoo mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	1	3,85
> 27 – 34	Cukup Baik	15	57,69
> 35 – 42	Baik	10	38,46
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
Jumlah		26	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menilai cukup baik sebanyak 15 orang (57,69 %) atau separuh lebih dari keseluruhan responden dan baik sebanyak 10 orang (38,46 %), sedangkan responden yang menilai tidak baik hanya 1 orang (3,85 %). Hal ini menunjukkan

bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Sawoo menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.14 Penilaian warga kecamatan Sawoo mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

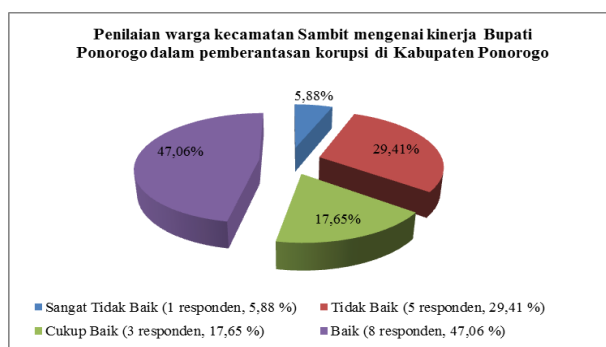
o. Kecamatan Sambit

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 17 responden di kecamatan Sambit menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Sambit dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.16
Penilaian warga kecamatan Sambit mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	1	5,88
> 19 – 26	Tidak Baik	5	29,41
> 27 – 34	Cukup Baik	3	17,65
> 35 – 42	Baik	8	47,06
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
Jumlah		17	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menilai cukup baik sebanyak 3 orang (17,65 %) dan baik sebanyak 8 orang (47,06 %), sedangkan responden yang menilai tidak baik 5 orang (29,41 %) dan sangat tidak baik sebanyak 1 orang (5,88 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau separuh lebih di kecamatan Sambit menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.15 Penilaian warga kecamatan Sambit mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

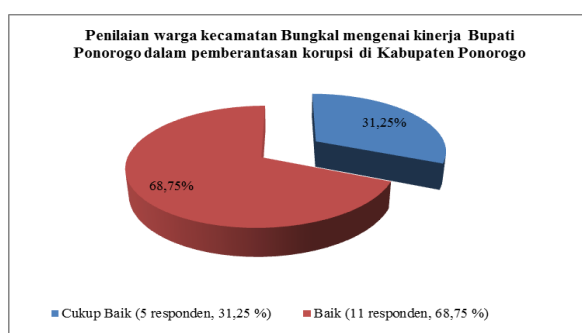
p. Kecamatan Bungkal

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 16 responden di kecamatan Bungkal menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Bungkal dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.17
 Penilaian warga kecamatan Bungkal mengenai kinerja Bupati Ponorogo
 dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	0	0
> 27 – 34	Cukup Baik	5	31,25
> 35 – 42	Baik	11	68,75
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
Jumlah		16	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden menilai cukup baik sebanyak 5 orang (31,25 %) dan baik sebanyak 11 orang (68,75 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Bungkal menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.16 Penilaian warga kecamatan Bungkal mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

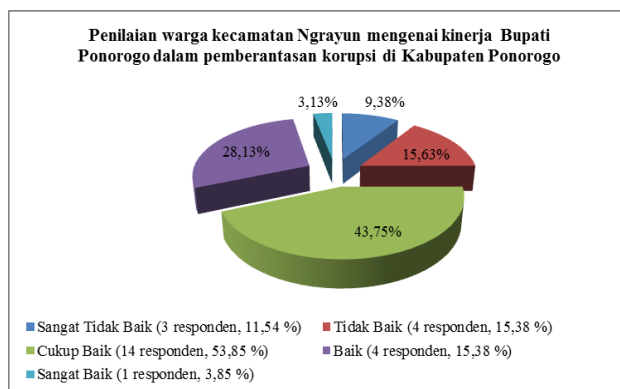
q. Kecamatan Ngrayun

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 26 responden di kecamatan Ngrayun menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Ngrayun dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.18
Penilaian warga kecamatan Ngrayun mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	3	11,54
> 19 – 26	Tidak Baik	4	15,38
> 27 – 34	Cukup Baik	14	53,85
> 35 – 42	Baik	4	15,38
> 43 – 50	Sangat Baik	1	3,85
Jumlah		26	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden berada pada rentang sangat tidak baik hingga sangat baik. Sebanyak 14 orang (53,85 %), baik sebanyak 4 orang (15,38 %), dan sangat baik sebanyak 1 orang (3,85 %), sedangkan dengan penilaian tidak baik sebanyak 4 orang (15,38 %) dan sangat tidak baik sebanyak 3 orang (11,54 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau separuh lebih responden di kecamatan Ngrayun menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.17 Penilaian warga kecamatan Ngrayun mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

r. Kecamatan Slahung

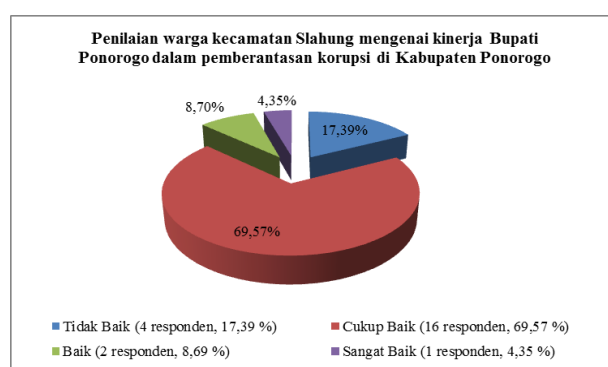
Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 23 responden di kecamatan Slahung menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Slahung dapat disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.19
Penilaian warga kecamatan Slahung mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	4	17,39
> 27 – 34	Cukup Baik	16	69,57
> 35 – 42	Baik	2	8,69
> 43 – 50	Sangat Baik	1	4,35
Jumlah		23	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden berada pada rentang tidak baik hingga sangat baik. Sebanyak 16 orang (69,57 %), baik sebanyak 2 orang (8,69 %), dan sangat baik sebanyak 1

orang (4,35 %), sedangkan dengan penilaian tidak baik sebanyak 4 orang (17,39 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Slahung menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.18 Penilaian warga kecamatan Slahung mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

s. Kecamatan Jambon

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 18 responden di kecamatan Jambon menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Jambon dapat disajikan pada tabel berikut,

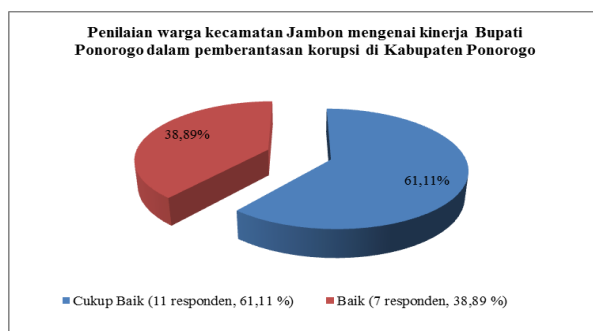
Tabel 3.20
Penilaian warga kecamatan Jambon mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	0	0

Tabel 3.20
Penilaian warga kecamatan Jambon mengenai kinerja Bupati Ponorogo
dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
> 27 – 34	Cukup Baik	11	61,11
> 35 – 42	Baik	7	38,89
> 43 – 50	Sangat Baik	0	0
Jumlah		18	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 11 orang (61,11 %) dan baik sebanyak 7 orang (38,89 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Jambon menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.19 Penilaian warga kecamatan Jambon mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

t. Kecamatan Badegan

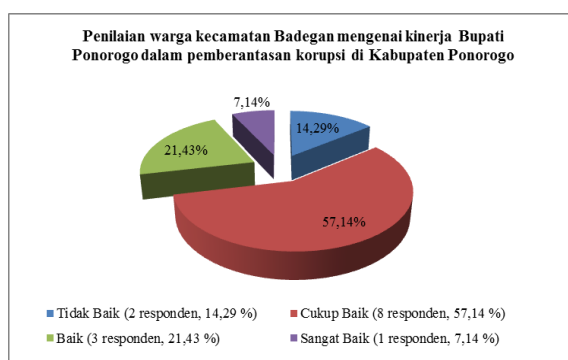
Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 14 responden di kecamatan Badegan menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian

kinerja masyarakat di kecamatan Badegan dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.21
Penilaian warga kecamatan Badegan mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	2	14,29
> 27 – 34	Cukup Baik	8	57,14
> 35 – 42	Baik	3	21,43
> 43 – 50	Sangat Baik	1	7,14
Jumlah		14	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 8 orang (57,14 %), baik sebanyak 3 orang (21,43 %), dan sangat baik sebanyak 1 orang (7,14 %), sedangkan sebanyak penilaian tidak baik yaitu sebanyak 2 orang (14,29 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Badegan menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.20 Penilaian warga kecamatan Badegan mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

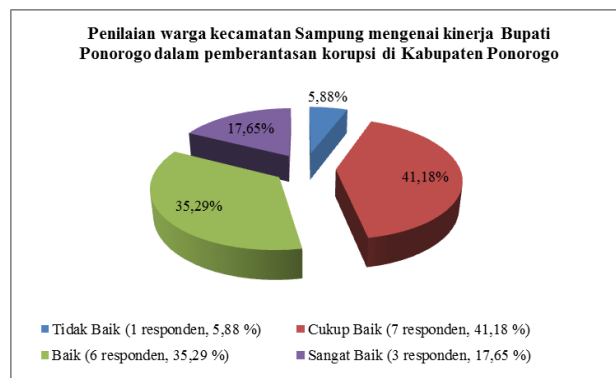
u. Kecamatan Sampung

Sebanyak 10 item pertanyaan yang diajukan kepada 17 responden di kecamatan Sampung menunjukkan hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui deskripsi secara keseluruhan mengenai penilaian kinerja masyarakat di kecamatan Sampung dapat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3.22
Penilaian warga kecamatan Sampung mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
10 – 18	Sangat Tidak Baik	0	0
> 19 – 26	Tidak Baik	1	5,88
> 27 – 34	Cukup Baik	7	41,18
> 35 – 42	Baik	6	35,29
> 43 – 50	Sangat Baik	3	17,65
Jumlah		17	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 7 orang (41,18 %), baik sebanyak 6 orang (35,29 %), dan sangat baik sebanyak 3 orang (17,65 %), sedangkan sebanyak penilaian tidak baik yaitu sebanyak 1 orang (5,88 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh responden di kecamatan Sampung menilai positif dan baik mengenai kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya penilaian kinerja setiap skala dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 3.21 Penilaian warga kecamatan Sampung mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa penilaian tiap kecamatan tidak selalu sama persebarannya terutama wilayah yang jauh dan dekat dengan pusat pemerintahan yaitu Ponorogo. Wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten Ponorogo antara lain kecamatan Ponorogo, kecamatan Siman, kecamatan Jetis, kecamatan Kauman, kecamatan, Sukorejo, kecamatan Babadan, dan kecamatan Jenangan. Kecamatan yang paling jauh antara lain kecamatan Pudak, kecamatan Sooko, kecamatan Sawoo, kecamatan Ngrayun, kecamatan Badegan, dan kecamatan Sampung.

Kecamatan yang dekat dengan pusat pemerintahan cenderung menilai lebih positif dan mayoritas lebih positif dalam menilai kinerja Bupati dalam pemberantasan korupsi, sedangkan kecamatan-kecamatan yang jauh dari Ponorogo cenderung lebih bervariasi penilaiannya seperti kecamatan Ngrayun yang ada responden dengan rentang penilaian sangat tidak baik hingga sangat baik.

Kecamatan kota atau Kecamatan Ponorogo memberikan hasil yang paling baik. Dari jumlah responden yang ada sebanyak 34 orang memberikan hasil 13 orang (38,24 %), responden yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 11 orang (32,35 %) dan sangat baik sebanyak 6 orang (17,65 %), sedangkan penilaian tidak baik sebanyak 4 orang (11,76 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden di kecamatan Ponorogo menilai bahwa kinerja dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo sudah baik.

Kecamatan Jenangan memberikan hasil yang paling minim atau buruk. Dikarenakan dari responden sebanyak 24 orang 18 orang (75 %) atau separuh lebih dari keseluruhan responden, dan sisanya yaitu sebanyak 6 orang (25 %) menilai baik. Mungkin ini di karenakan kurang sosialisasinya pemerintah terhadap masyarakat setempat.

Perbedaan penilaian ini dimungkinkan karena sudah atau belum terpenuhinya segala fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dibangun di setiap kecamatan. Umumnya pembangunan di kecamatan yang dekat dengan pusat pemerintahan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan yang jauh, hal ini karena akses yang lebih cepat karena kedekatan lokasi yang memudahkan akses ke pusat pemerintahan, sedangkan kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan kadang belum menjadi prioritas jika belum ada permintaan maupun proposal dari masyarakat. Meskipun sudah ada permintaan misalnya pembangunan jalan atau infrastruktur, realisasinya sangat lama.

2. Penilaian Secara Keseluruhan

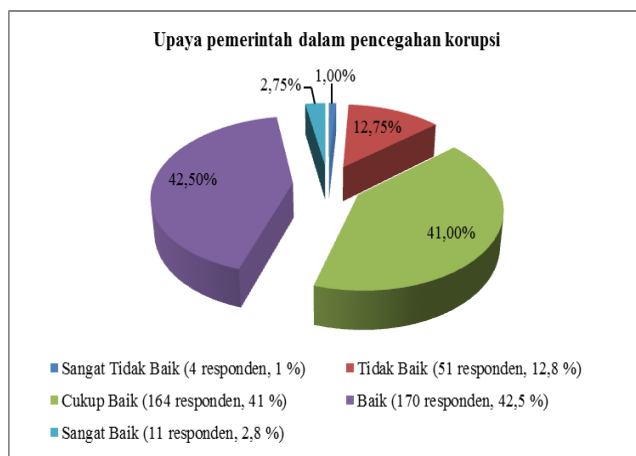
Sebanyak 400 responden tersebut mengemukakan persepsinya mengenai kinerja Bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo periode tahun 2010-2015. Seperti diketahui bahwa persepsi merupakan suatu pendapat, pandangan, atau anggapan sekumpulan manusia terhadap suatu objek, dalam hal ini adalah pemerintah Ponorogo periode 2010-2015 dalam pemberantasan korupsi. Pendapat, pandangan, ataupun anggapan ini berbeda-beda setiap anggota masyarakatnya karena dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengalaman, motivasi maupun pengetahuan dari setiap orang dalam masyarakat itu sendiri.

Persepsi masyarakat kabupaten Ponorogo terhadap kinerja Bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo periode tahun 2010-2015 juga berbeda-beda. Berdasarkan 10 item yang dirumuskan oleh peneliti mengenai kinerja pemberantasan korupsi, maka dapat disimpulkan persepsi masyarakat. Hasil masing-masing item tersebut dijelaskan sebagai berikut,

a. Upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi

Upaya pencegahan korupsi merupakan upaya preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi dilakukan pegawai pemerintahan kabupaten Ponorogo. Responden menilai bahwa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik. Dari 400 responden, 4 (1 %) orang menilai sangat buruk, 51 orang (12,8 %)

menilai buruk, 164 orang (41 %) cukup baik, 170 orang (42,5 %) baik, dan 11 orang (2,8 %) menilai sangat baik.

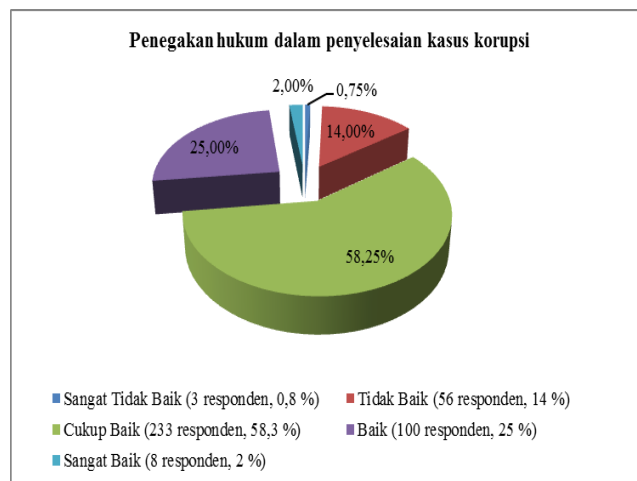


Gambar 3.22 Penilaian kinerja Bupati Ponorogo mengenai upaya pencegahan korupsi

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penilaian sebagian besar yaitu cukup baik dan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi dinilai baik oleh masyarakat di kabupaten Ponorogo.

b. Penegakan hukum dalam penyelesaian kasus korupsi

Dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi, terdapat peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelakunya. Responden menilai bahwa penegakan hukum dalam penyelesaian kasus korupsi oleh Bupati Ponorogo 2011-2015 sudah cukup baik. Dari 400 responden, 3 (0,8 %) orang menilai sangat buruk, 56 orang (14 %) menilai buruk, 233 orang (58,3 %) cukup baik, 100 orang (25 %) baik, dan 8 orang (2 %) menilai sangat baik.



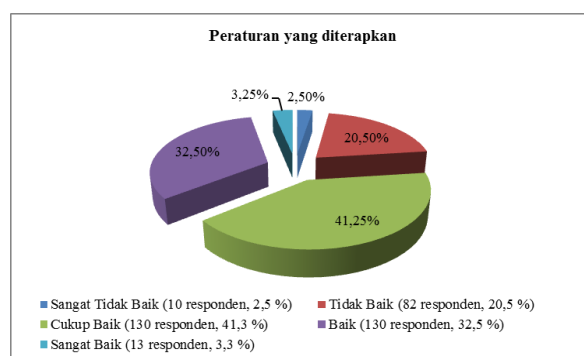
Gambar 3.23 Penilaian kinerja Bupati Ponorogo mengenai penegakan hukum dalam penyelesaian kasus korupsi

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penilaian sebagian besar yaitu cukup baik dan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam penyelesaian kasus korupsi dinilai baik oleh masyarakat di kabupaten Ponorogo.

c. Peraturan yang diterapkan

Peraturan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Responden menilai bahwa peraturan yang ada sudah cukup baik untuk diterapkan. Dari 400 responden, 10 (2,5 %) orang menilai sangat buruk, 82 orang (20,5 %) menilai buruk, 165 orang (41,3 %) cukup baik, 130 orang (32,5 %) baik, dan 13 orang (3,3 %) menilai sangat baik.



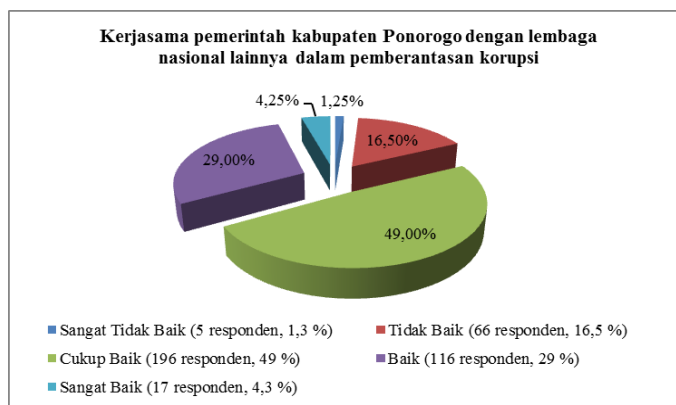
Gambar 3.24 Penilaian kinerja Bupati Ponorogo mengenai peraturan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penilaian sebagian besar yaitu cukup baik dan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi dinilai baik oleh masyarakat di kabupaten Ponorogo.

d. Kerjasama pemerintah kabupaten Ponorogo dengan lembaga nasional lainnya dalam pemberantasan korupsi

Responden menilai bahwa kerjasama pemerintah kabupaten Ponorogo dengan lembaga nasional lainnya dalam pemberantasan korupsi sudah cukup baik. Dari 400 responden, 5 orang (1,3 %) orang menilai sangat buruk, 66 orang (16,5 %) menilai buruk, 196 orang (49

%) cukup baik, 116 orang (29 %) baik, dan 17 orang (4,3 %) menilai sangat baik.

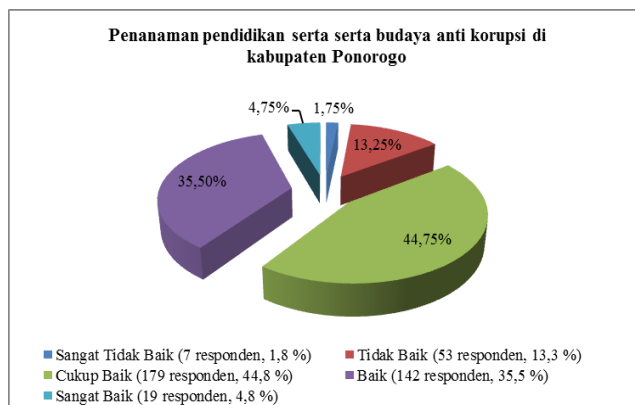


Gambar 3.25 Penilaian kinerja Bupati Ponorogo mengenai kerjasama pemerintah kabupaten Ponorogo dengan lembaga nasional lainnya dalam pemberantasan korupsi

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penilaian sebagian besar yaitu cukup baik dan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerjasama pemerintah kabupaten Ponorogo dengan lembaga nasional lainnya dalam pemberantasan korupsi dinilai baik oleh masyarakat di kabupaten Ponorogo.

e. Penanaman pendidikan serta budaya anti korupsi di kabupaten Ponorogo

Responden menilai bahwa penanaman pendidikan serta budaya anti korupsi di kabupaten Ponorogo sudah cukup baik. Dari 400 responden, 7 orang (1,8 %) orang menilai sangat buruk, 53 orang (13,3 %) menilai buruk, 179 orang (44,8 %) cukup baik, 142 orang (35,5 %) baik, dan 19 orang (4,8 %) menilai sangat baik.

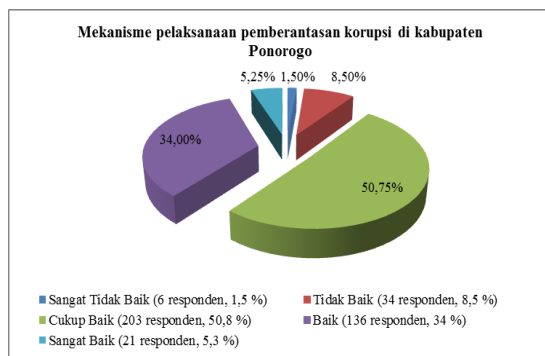


Gambar 3.26 Penilaian kinerja Bupati Ponorogo mengenai penanaman pendidikan serta budaya anti korupsi di kabupaten Ponorogo

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penilaian sebagian besar yaitu cukup baik dan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penanaman pendidikan serta budaya anti korupsi di kabupaten Ponorogo dinilai baik oleh masyarakat di kabupaten Ponorogo.

f. Mekanisme pelaksanaan pemberantasan korupsi di kabupaten Ponorogo

Responden menilai bahwa mekanisme pelaksanaan pemberantasan korupsi di kabupaten Ponorogo sudah cukup baik. Dari 400 responden, 6 orang (1,5 %) orang menilai sangat buruk, 34 orang (8,5 %) menilai buruk, 203 orang (50,8 %) cukup baik, 136 orang (34 %) baik, dan 21 orang (5,3 %) menilai sangat baik.

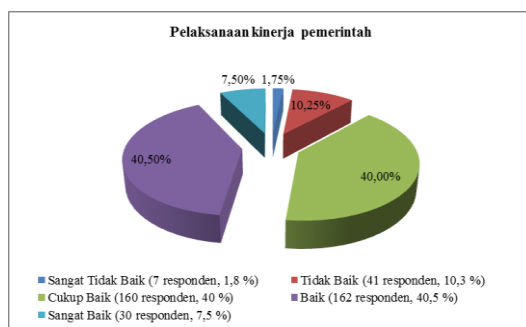


Gambar 3.27 Penilaian kinerja Bupati Ponorogo mengenai mekanisme pelaksanaan pemberantasan korupsi di kabupaten Ponorogo

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penilaian sebagian besar yaitu cukup baik dan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pemberantasan korupsi di kabupaten Ponorogo dinilai baik oleh masyarakat di kabupaten Ponorogo.

g. Pelaksanaan kinerja pemerintah

Responden menilai bahwa pelaksanaan kinerja pemerintah di kabupaten Ponorogo sudah cukup baik. Dari 400 responden, 7 orang (1,8 %) orang menilai sangat buruk, 41 orang (10,3 %) menilai buruk, 160 orang (40 %) cukup baik, 162 orang (40,5 %) baik, dan 30 orang (7,5 %) menilai sangat baik.

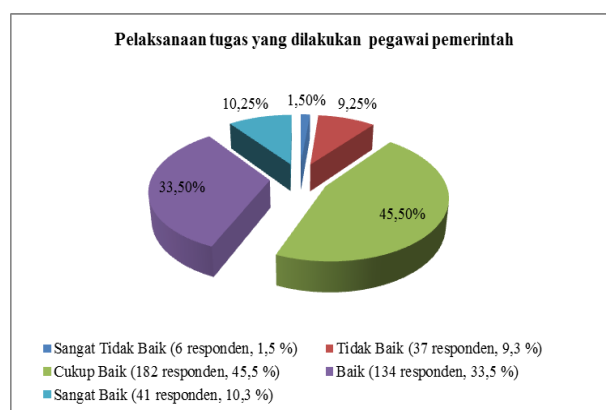


Gambar 3.28 Penilaian kinerja Bupati Ponorogo mengenai pelaksanaan kinerja pemerintah

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penilaian sebagian besar yaitu cukup baik dan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja pemerintah di kabupaten Ponorogo dinilai baik oleh masyarakat di kabupaten Ponorogo.

h. Pelaksanaan tugas yang dilakukan pegawai pemerintah

Responden menilai bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan pegawai pemerintah di kabupaten Ponorogo sudah cukup baik. Dari 400 responden, 6 orang (1,5 %) orang menilai sangat buruk, 37 orang (9,3 %) menilai buruk, 182 orang (45,5 %) cukup baik, 134 orang (33,5 %) baik, dan 41 orang (10,3 %) menilai sangat baik.

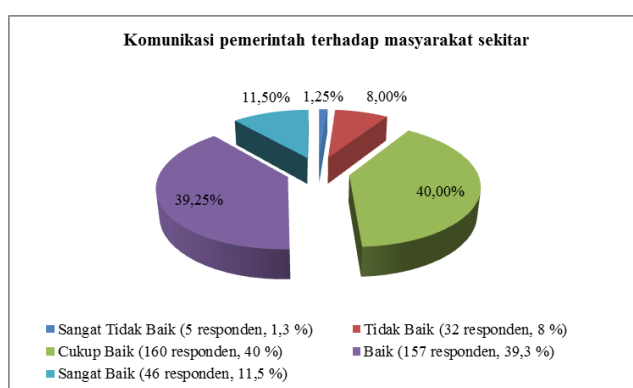


Gambar 3.29 Penilaian kinerja Bupati Ponorogo mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan pegawai pemerintah

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penilaian sebagian besar yaitu cukup baik dan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan pegawai pemerintah di kabupaten Ponorogo dinilai baik oleh masyarakat di kabupaten Ponorogo.

i. Komunikasi pemerintah terhadap masyarakat sekitar

Responden menilai bahwa komunikasi pemerintah terhadap masyarakat sekitar di Ponorogo sudah cukup baik. Dari 400 responden, 5 orang (1,3 %) orang menilai sangat buruk, 32 orang (8 %) menilai buruk, 160 orang (40 %) cukup baik, 157 orang (39,3 %) baik, dan 46 orang (11,5 %) menilai sangat baik.



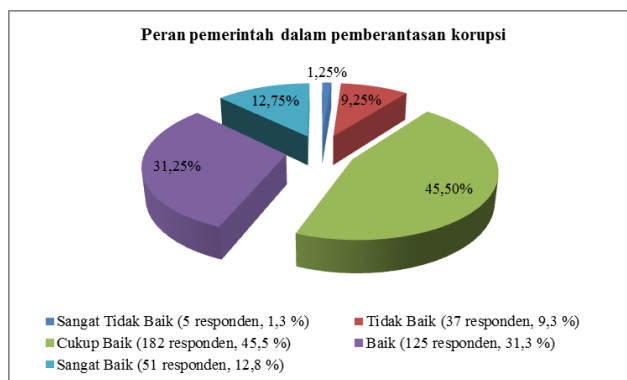
Gambar 3.30 Penilaian kinerja Bupati Ponorogo mengenai komunikasi pemerintah terhadap masyarakat sekitar

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penilaian sebagian besar yaitu cukup baik dan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemerintah terhadap masyarakat sekitar dinilai baik oleh masyarakat di kabupaten Ponorogo.

j. Peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi

Responden menilai bahwa peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Ponorogo sudah cukup baik. Dari 400 responden, 5 orang (1,3 %) orang menilai sangat buruk, 37 orang (9,3

%) menilai buruk, 182 orang (45,5 %) cukup baik, 125 orang (31,3 %) baik, dan 51 orang (12,8 %) menilai sangat baik.



Gambar 3.31 Penilaian kinerja Bupati Ponorogo mengenai peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penilaian sebagian besar yaitu cukup baik dan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi dinilai baik oleh masyarakat di kabupaten Ponorogo.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo periode tahun 2010-2015 dalam analisis deskriptif maka dapat dijabarkan sebagai berikut,

Berdasarkan hasil olah data frekuensi persepsi responden, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo periode tahun 2010-2015 dikategorikan cukup baik. Hal tersebut didukung dari hasil perhitungan yang menunjukkan *mean* (rata-rata) yaitu 3,32 yang

berada pada kategori cukup baik. Berikut ini disajikan persebaran persepsi masyarakat secara umum,

Tabel 3.23 Interval persepsi masyarakat

Nilai interval	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Baik	4	1
1,81 – 2,60	Tidak Baik	31	7,75
2,61 – 3,40	Cukup Baik	207	51,75
3,41 – 4,20	Baik	141	35,25
4,21 – 5,00	Sangat Baik	17	4,25
Jumlah		400	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Bupati Ponorogo 2010-2015 dalam pemberantasan korupsi yaitu cukup baik dan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat baik dan positif dalam pemberantasan korupsi di kabupaten Ponorogo.

B. Pembahasan

Sebagian masyarakat Ponorogo yang berada di kecamatan tertentu, terutama kecamatan yang jauh dari pusat pemerintah belum terlalu memahami mengenai adanya kasus korupsi secara mendetail yang ada di Ponorogo . penulis berangapan sesuai dengan wawancara yang dilakukan bahwa masyarakat tidak terlalu memahami kasus korupsi yang ada di Kabupaten Ponorogo karena rendahnya pendidikan atau pemberitaan yang sangat kurang tentang korupsi di kecamatan tersebut.

Korupsi yang dilakukan pemerintah dinilai merugikan masyarakat. Sebagai wakil masyarakat, penyalahgunaan kepercayaan menjadi hal yang sangat sensitif bagi masyarakat. Untuk menunjang upaya pencegahan korupsi maka Penyelenggara Negara terutama di Kabupaten Ponorogo wajib untuk

melaporkan harta kekayaannya. Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Secara umum, persepsi masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana korupsi dinilai cukup baik. Hanya saja masih ada sebagian yang menilai buruk upaya tersebut. Buruknya penegakan hukum ini juga ditunjukkan dari sikap masyarakat yang melakukan demo dalam penyelesaian kasus korupsi yang dilakukan oleh wakil Bupati Ponorogo yang tergabung dalam KPPHP (Koalisi Peduli Penegakan Hukum Ponorogo) melakukan aksi demo ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur jalan A Yani Surabaya. Dalam aksinya, mereka meminta agar Kejati Jatim mengusut tuntas kasus DAK yang melibatkan mantan Wakil Bupati Yuni Widyaningsih.

Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman penyelesaian tindak pidana korupsi dan penegakan hukumnya membentuk persepsi masyarakat yang buruk mengenai upaya penyelesaian tindak pidana korupsi.

Dalam upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di Kabupaten Kabupaten Ponorogo oleh Bupati Ponorogo periode tahun 2010-2015

meliputi upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi, penegakan hukum sesuai dengan Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam penyelesaian kasus korupsi, peraturan yang diterapkan, kerjasama pemerintah kabupaten Ponorogo dengan lembaga nasional lainnya dalam pemberantasan korupsi, penanaman pendidikan serta serta budaya anti korupsi di kabupaten Ponorogo, mekanisme pelaksanaan pemberantasan korupsi di kabupaten Ponorogo, pelaksanaan kinerja pemerintah, pelaksanaan tugas yang dilakukan pegawai pemerintah, komunikasi pemerintah terhadap masyarakat sekitar, dan peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Persepsi masyarakat paling buruk dan buruk yaitu mengenai penegakan hukum dalam penyelesaian kasus korupsi dimana jumlah responden menilai paling banyak dibanding penilaian upaya yang lainnya. Penilaian ini didukung dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan warga di Kecamatan Balong, salah warga memberi jawaban “ menurut saya penegakan hukum yang ada di ponorogo itu sangat lemah mas, karena bisa kita lihat mantan wakil bupati yang korupsi Bu Ida sampai saat ini masih bisa berkeliaran kemana – mana ”

Tindakan berupa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Ponorogo dipersepsikan paling banyak oleh responden dengan penilaian sebagai tindakan yang baik oleh masyarakat. Penilaian ini didukung dengan hasil kutipan dari perbincangan saya dengan salah satu pegawai di Kecamatan Slahung “ kalau untuk tindakan pencegahan saya rasa

sangat bagus, karena begitu ada kasus korupsi yang berlalu kemarin sekarang laporan – laporan yang ada oleh pak bupati lebih di ketatin”

Persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan kinerja pemerintah Ponorogo juga dinilai baik dan sangat baik dengan jumlah responden yang sangat tinggi dengan total 192 responden (48 %) atau hampir separuh dari seluruh responden. Pada hasil point pertanyaan mengenai pelaksanaan kinerja pemerintah begitu baik didukung dengan hasil perbincangan saya dengan tetangga saya warga Kecamatan Ponorogo “ kinerja pemerintah dimasa kepemimpinan bapak amin itu begitu baik, karena untuk mengurus apapun tidak dipersulit oleh para pegawai kantor “